

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN
2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2022, Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

Laporan Kinerja (LKJ) disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Dokumen Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2022 ini disusun dengan tujuan sebagai dokumen bahan pencapaian target/perencanaan jangka pendek yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta ketersediaan anggaran yang ada pada DPA Dinas Kominfo, sehingga penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi dapat berjalan tepat waktu serta tepat guna.

Demikian Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2022 ini dibuat dan dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Jambi, Februari 2023

KEPALA DINAS,



Ir. Nurachmat Herlambang, MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 19680904 199503 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| 1.1. | Latar Belakang |
| 1.2. | Gambaran Umum Dinas Komunikasi Informatika |
| 1.3. | Tugas Pokok dan Fungsi |
| 1.4. | Struktur Organisasi |
| 1.5. | Isu Strategis |
| 1.6. | Landasan Hukum |
| 1.7. | Inovasi |
| 1.8. | Sistematika |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| 2.1. | Visi dan Misi |
| 2.2. | Tujuan, Sasaran dan Indikator |
| 2.3. | Indikator Kinerja Utama |
| 2.4. | Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun |
| 2.5. | Program Kegiatan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2024 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| 3.1 | Kerangka Pengukuran Kinerja |
| 3.2. | Capaian Indikator Kinerja Utama |
| 3.3. | Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis |
| 3.4. | Akuntabilitas Keuangan |
| 3.5. | Prestasi dan Penghargaan |
| BAB IV | PENUTUP |
| | Lampiran |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No.

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi Informatika selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Jambi, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

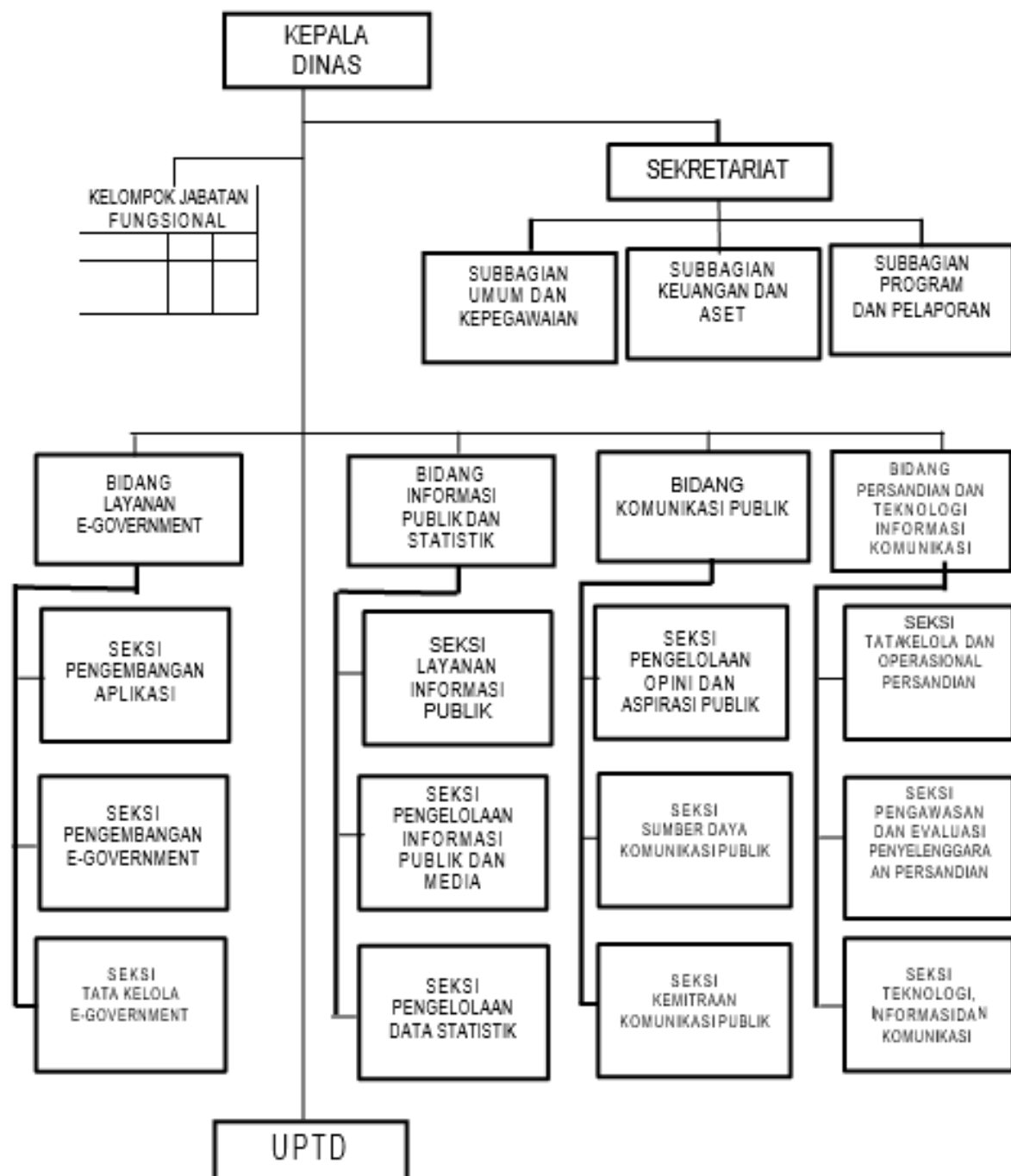
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi Informatika Jambi diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi (LKJ). Penyusunan LKJ Dinas Komunikasi Informatika Jambi Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi

Di Provinsi Jambi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini, Pemerintah Provinsi Jambi cukup responsive dan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya *good governance* melalui pengembangan Elektronik Government (*e-Government*), Dinas Kominfo Provinai Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 dan terakhir Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI



GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR

Tabel. 1.2. Data Pegawai**a. Berdasarkan Jabatan**

| NO | PENDIDIKAN PENJENJANGAN | JUMLAH | PERSEN (%) |
|--------|----------------------------|--------|------------|
| 1. | ESELON II | 1 | - |
| 2. | ESELON III | 5 | - |
| 3. | ESELON IV | 15 | - |
| JUMLAH | | 21 | 100,00 |

b. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

| NO | PENDIDIKAN PENJENJANGAN | JUMLAH | PERSEN (%) |
|--------|----------------------------|--------|------------|
| 1. | DIKLATPIM TK II | - | - |
| 2. | DIKLATPIM TK III | 10 | - |
| 3. | DIKLATPIM TK IV | 20 | - |
| JUMLAH | | 30 | 100,00 |

C. Berdasarkan Pendidikan Formal

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH | PERSEN (%) |
|--------|--------------------|--------|------------|
| 1. | SD | - | - |
| 2. | SMP | - | - |
| 3. | SMA | 8 | - |
| 4. | D.2 | - | - |
| 5. | D.3 | 8 | - |
| 6. | S.1 | 40 | - |
| 7. | S.2 | 11 | - |
| 8. | S.3 | - | - |
| JUMLAH | | 67 | 100,00 |

b. Berdasarkan Golongan

| NO | GOLONGAN | JUMLAH | PERSEN (%) |
|--------|----------|--------|------------|
| 1 . | IV a | 6 | - |
| 2 . | IV b | 3 | - |
| 3 . | IV c | 1 | - |
| 4 . | III a | 4 | - |
| 5 . | III b | 12 | - |
| 6 . | III c | 14 | - |
| 7 . | III d | 20 | - |
| 8 . | II a | - | - |
| 9 . | II b | - | - |
| 10. | II c | 3 | - |
| 11 . | II d | 4 | - |
| 12 . | I a | - | - |
| 13 . | I b | - | - |
| 14 . | I c | - | - |
| JUMLAH | | 67 | 100,00 |

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Tugas

Sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi, informatika, Persandian dan Statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.4 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan pelayanan teknis dan administratif di lingkup Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud, membawahi :

- a. Sub Bagian Program dan pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

3. Bidang Layanan E-Government

Mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan e-government serta tata kelola e-government sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang E-Government sebagaimana dimaksud, membawahi :

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi
- b. Seksi Pengembangan E-Government mempunyai tugas:
- c. Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai tugas:

4. Bidang Informasi Publik dan Statistik

Bidang Informasi Publik dan Statistik mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan diseminasi dan pelayanan informasi publik dan penanganan aduan masyarakat, pengelolaan dan pengembangan informasi serta pemberdayaan media informasi publik, dan pengelolaan data statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Informasi Publik dan Statistik sebagaimana dimaksud, membawahi :

- a. Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai tugas:
- b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media mempunyai tugas:
- c. Seksi Pengelolaan Data Statistik mempunyai tugas:

5. Bidang Komunikasi Publik

Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini publik, sumber daya komunikasi publik dan kemitraan komunikasi publik.

Bidang Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud, membawahi :

- a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, mempunyai tugas:
- b. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas:
- c. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, mempunyai tugas:

6. Bidang Persandian dan Teknologi Informasi Komunikasi

Bidang Persandian dan Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan operasional persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan teknologi informasi komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Persandian dan Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud, membawahi :

- a. Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian mempunyai tugas:
- b. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai tugas:
- c. Seksi Teknologi, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas:

7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

1.5 Isu Strategis

Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi mengangkat beberapa isu strategis bidang komunikasi informatika dan statistik adalah sebagai berikut :

1. Perlunya adanya data center yang menjadi pusat data Pemerintah Provinsi Jambi dengan peran seluruh Perangkat Daerah dengan peran Dinas Komunikasi, Informatika sebagai koordinator;
2. Perlunya penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet lingkup Pemerintah Provinsi Jambi pada semua Perangkat Daerah;
3. Peningkatan komitmen dan implementasi e-Government Pemerintah Provinsi Jambi;
4. Percepatan pembangunan sistem aplikasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Jambi melalui penerapan seluruh aplikasi yang telah disiapkan;
5. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman dan handal;
6. Pembentukan dan pemberdayaan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat secara mudah;
7. Menjamin ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat;
8. Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Jambi yang menguasai teknologi informasi secara berkala dan berkelanjutan.

1.6 Landasan Hukum

LKJ Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Jambi ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.7 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jambi Jambi Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Renstra 2021-2026

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan Strategis (Renstra Tahun 2021-2026)

2.1 Visi dan Misi

Visi

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah adalah:

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Jambi Nyaman : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mencapai visi tersebut maka diuraikan pada tiga misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang tertuang dalam misi ke 1 yaitu **“Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi”, dan misi ke-2 yaitu **“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.”

Untuk mewujudkan misi diatas maka Dinas Kominfotik merumuskan 4 Program Prioritas yaitu: Program Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dan Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Mengacu pada Visi dan Misi Gubernur Jambi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

Tabel 4.2.
Tujuan dan
Sasaran Jangka
Menengah

| TUJUAN | INDIKATOR | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi | | Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik | Peringkat Keterbukaan Informasi | Menuju Informatif (81) | Menuju Informatif (86) | Informatif (91) | Informatif (93) | Informatif (95) |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | | Meningkatnya Penggunaan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan | Indeks SPBE | 2,7 | 3.0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
| | | | | | | | | |

2.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Komunikasi Informatika Pemerintah Provinsi Jambi telah menyusun Indikator Kinerja Utama.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Jambi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator
Kinerja Utama
Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN | | |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | | ALASAN | FORMULA / RUMUS PERITUNG | SUMBER DATA |
| 1 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | Peningkatan implementasi e-Government ditandai dengan peningkatan indeks | Indeks SPBE dari Kemenpan dan RB | Laporan SKPD |
| 2 | Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik | Peringkat Keterbukaan Informasi Publik | Peringkat | Peningkatan keterbukaan informasi publik ditandai dengan peningkatan nilai dari Komisi | Peringkat Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat | Laporan SKPD |

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Gubernur Jambi dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik | 1. Peningkatan Keterbukaan Informasi Perangkat daerah | Menuju Informatif |
| 3 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintah Provinsi Jambi | 2.7 |

2.5 Program Kegiatan Prioritas Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Jambi Tahun 2022

Untuk menunjang tercapainya tujuan, sasaran serta indikator kinerja utama, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi diimplementasikan melalui 5 Program yang di dukung 12 Kegiatan dan 39 Sub kegiatan yaitu :

Program Prioritas :

1. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA.

Program ini bertujuan Penyediaan, pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi serta Pembangunan, Pengembangan Aplikasi dan Telematika (TIK) di Lingkup

Pemerintah Provinsi Jambi.

Program ini juga bertujuan untuk mendorong seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam ketersediaan Website untuk memberikan informasi Pemerintahan dan Pembangunan website dan aplikasi di Provinsi Jambi guna terwujudnya SPBE

Pada program ini pula melaksanakan Program DUMISAKE dengan pengadaan akses internet bagi desa yang termasuk dalam kategori blank spot

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK.

Program ini bertujuan untuk melakukan diseminasi informasi dalam rangka memberikan layanan informasi terkait pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi, Peningkatan Kinerja dan kualitas SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mendorong terlaksananya layanan informasi yang berkualitas pada badan publik, optimalisasi Komisi Informasi sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, antara lain forum informasi, penanganan sengketa informasi melalui mediasi dan adjudikasi non litigasi.

3. PROGRAM PERSANDIAN UNTUK PENGAMAN INFORMASI.

Program ini merencanakan kegiatan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintah terkait dengan persandian

4. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL

Program ini mempunyai fungsi merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengumpulkan data urusan statistik sektoral.

PROGRAM PENUNJANG :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi perkantoran dalam mewujudkan tertib administrasi, kenyamanan kerja serta peningkatan disiplin dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Rencana kinerja tahunan Dinas Kominfo Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2022 terdiri 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh delapan) sub kegiatan yang meliputi :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
 - 1) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan
 - 2) Pemeliharaan/rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
 - 3) Pemeliharaan/rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

II. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 2) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 3) Pelayanan Informasi Publik
 - 4) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
 - 5) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 6) Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi

- 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Pengelolaan e-government diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1) Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi
 - 2) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik
 - 3) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - 4) Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik Sektoral
 - 2) Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi
 - 3) Membangun Metadata Statistik Sektoral

V. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

1. penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - 2) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - 3) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik
 - 4) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Jambi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Jambi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan

Dari hasil pencapaian tujuan Dinas Komunikasi Informatika Jambi tahun 2022 didapatkan dari hasil Indikator Kinerja Utama, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika
Jambi Tahun 2022

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja Utama | Target 2022 | Realisasi 2022 | Capaian (%) |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,7 | 2,19 | 81,11 |
| 2 | Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik | Peringkat Keterbukaan Informasi publik | Menuju Informatif (86) | Menuju Informatif (89,21) | 100 |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja sebagai berikut :

Capaian kinerja belum mencapai target yaitu 81,11% (delapan puluh satu koma sebelas) persen ditunjukan pada nilai indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kemenpan dan RB dengan target kinerja tahun 2022 Nilai Indeks SPBE 2.7 (baik) telah dievaluasi oleh Kemenpan dan RB dengan mendapat Nilai 2,19 (baik) sehingga realisasi capaian kinerja tidak mencapai target 100% (seratus) persen.

Capaian kinerja yang mencapai target dari 100% (seratus) persen dapat ditunjukkan pada nilai indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan target kinerja tahun 2022 yaitu dengan nilai indeks 86 (menuju informatif) dan telah dilakukan evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan mendapatkan nilai 89.21 (menuju informatif) sehingga realisasi capaian 100% (seratus) persen.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dari hasil Capaian Indikator Kinerja secara umum ,Dinas Komunikasi Informatika Jambi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika Jambi Tahun 2021-2026.

Tahun 2022 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi, dari sasaran strategis dengan indikator kinerja yang ditetapkan maka analisis pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi sebagai berikut:

Pada analisis pencapaian kinerja dilakukan perbandingan tahun 2021 dan tahun 2022. Adapun analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2022

| NO | INDIKATOR | CAPAIAN KINERJA 2021 | | CAPAIAN KINERJA 2022 | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
| 1 | Peningkatan Keterbukaan Informasi Perangkat daerah | Cukup Informatif (66.19) | Menuju informatif (81.41) | Menuju Informatif (85.0) | Menuju Informatif (89.21) | 100 |
| 2 | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintah Provinsi Jambi | | 2.16 | 2.7 | 2.19 | 81.11 |

Sumber :

1. SK Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 09/KEP/KIP/XII/2022
2. SK MENPAN RB Nomo 108 Tahun 2023

1. Pencapaian indikator Peningkatan Keterbukaan Informasi Perangkat Daerah

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik dilakukan tahapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) tahun 2022 yang di selenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, adapun maksud dari dilaksanakannya Monev KIP tersebut bertujuan untuk menetapkan kategori pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk komitmen Komisi Informasi Pusat untuk mendorong keterbukaan di Badan Publik yang harus tunduk pada ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tehnik dan Metode

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik menjadi rujukan utama dalam hal pelaksanaan evaluasi. Peraturan Komisi Informasi ini mensyaratkan, bahwa indikator utama yang dievaluasi di level badan publik adalah meliputi empat indikator keterbukaan informasi publik. Adapun empat indikator tersebut adalah yakni :

- a. Mengumumkan Informasi Publik; (Pengembangan website)
- b. Menyediakan Informasi Publik: (Pengumuman informasi publik)
- c. Pelayanan Permohonan Informasi Publik: (Pelayanan informasi publik) dan
- d. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik (Penyediaan Informasi Publik)

Selain empat indikator diatas, penilaian juga dilakukan dengan melihat 5 (lima) unsur yaitu: (komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi dan konsistensi) dalam implementasi UU KIP yang dinilai melalui tahapan presentasi.

Karenanya secara teknis tahapan dari evaluasi yang dilakukan adalah 3 tahapan yakni tahap pengintaian (*reconnaissance*) website, kedua tahap verifikasi dan ketiga tahap presentasi. Setiap tahapan dan indikator memiliki bobot tersendiri, masing-masing tahapan tersebut adalah:

- a. Pengintaian website dengan bobot nilai 30 % dengan 2 indikator penilaian.

| N | PENILAIAN | B |
|---|---------------------------------------|-----|
| 1 | Indikator Pengembangan website | 40% |
| 2 | Indikator Pengumuman Informasi Publik | 60% |

- b. Verifikasi terhadap badan publik yang mengembalikan SAQ disertai data dukung dengan bobot nilai 40 % dengan 2 indikator penilaian.

| NO | PENILAIAN | BOBOT |
|----|---------------------------------------|-------|
| 1 | Indikator Pelayanan Informasi Publik | 50% |
| 2 | Indikator Penyediaan Informasi Publik | 50% |
| | | |

- c. Penilaian Presentasi dengan bobot nilai 30 % dengan 3 indikator penilaian.

| NO | PENILAIAN | BOBOT |
|----|----------------------|-------|
| 1 | Indikator Komitmen | 30% |
| 2 | Indikator Koordinasi | 20% |
| 3 | Indikator Inovasi | 50% |

Kualifikasi Peringkat

Secara keseluruhan, tahapan, proses dan instrumen yang digunakan tersebut diatas akan menghasilkan nilai dan kualifikasi peringkat Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut :

| NO | KUALIFIKASI PERINGKAT | NILAI INDEKS |
|----|-----------------------|--------------|
| 1 | Informatif | 90 - 100 |
| 2 | Menuju Informatif | 80 – 89,9 |
| 3 | Cukup Informatif | 60 – 79,9 |
| 4 | Kurang informatif | 40 – 59,9 |
| 5 | Tidak informatif | <39 |

Berdasarkan keseluruhan hasil tahapan penilaian yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jambi, maka pada pengumuman hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik pada Pemerintah Daerah Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan nilai akhir 89,21 masih dengan kualifikasi “Menuju Informatif” hal ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 81,41 predikat “Menuju Informatif”, dan tahun 2020 yang meraih nilai 66,19 dengan kualifikasi “Cukup Informatif”.

Yang menjadi parameter meningkatnya hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jambi diantaranya yaitu :

| No. | Tahun | Parameter Hasil Penilaian Monev | | | | |
|-----|-------|---------------------------------|----------|-----|-----|----------------------------|
| | | Mengikuti Monev | Web PPID | DIP | DIK | Aplikasi PPID di Playstore |
| 1. | 2018 | X | X | X | X | X |
| 2. | 2019 | √ | X | X | X | X |
| 3. | 2020 | √ | √ | √ | √ | X |
| 4. | 2021 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5. | 2022 | √ | √ | √ | √ | √ |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya dalam membangun *mindset* aparatur pemerintahan bahwa pentingnya penyediaan informasi publik secara berkelanjutan guna mencerdaskan masyarakat di samping itu, akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Adapun keberhasilan Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan nilai peringkat keterbukaan informasi public dikarenakan beberapa hal diantaranya yaitu :

1. Kepedulian pimpinan mulai dari Gubernur Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi serta kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi dalam mendukung peningkatan keterbukaan informasi di Provinsi Jambi
2. Keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung peningkatan keterbukaan informasi di Provinsi Jambi
3. Keterlibatan OPD Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung peningkatan keterbukaan informasi di Provinsi Jambi

Faktor Penghambat/kendala yang dihadapi

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

- a) Kurang SDM yang memadai
- b) Masih terhambatnya koordinasi dalam hal pengumpulan data (Laporan Tahunan PPID)

Rekomendasi

- a. Peningkatan pertemuan koordinasi antar PPID di internal OPD, PPID Kabupaten/Kota dan PPID Provinsi Jambi.
- b. Peningkatan intensitas bimbingan teknis dan supervisi kepada PPID dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan secara khusus terkait dengan pemahaman pada instrumen monitoring dan evaluasi.

- c. Perlunya diselenggarakan forum evaluasi secara mendalam kepada pimpinan OPD terkait komitmen implementasi Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Perlunya peningkatan alokasi anggaran dan pengadaan sarana dan prasarana PPID di masing-masing OPD.
- e. Perbaikan sistem pelayanan pengelolaan dan pendokumentasian informasi antara lain menggunakan teknologi informasi dan pendekatan dengan menggunakan file digital untuk menyimpan dokumen.

Kerjasama media

Kerjasama dengan media yang ditargetkan sebanyak 209 media pada tahun 2022, pada pelaksanaannya telah tercapai target kerjasama sebanyak 253 media sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kominfo yakni dengan terjalinnya kerjasama oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2022 dengan media cetak sebanyak 46 media, media online 178 media, media elektronik TV 10 stasiun televisi, radio 19.

Terkait dengan kerjasama media diatas bidang komunikasi publik sudah melakukan pemantauan media melalui Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik yang merupakan kegiatan Pemantauan Terhadap Media Online lokal yang ada di Provinsi Jambi. Sesuai dengan Data yang ada di Dinas Kominfo Provinsi Jambi ada 178 Media Online yang bekerjasama dan kami pantau dengan Pemerintah Provinsi Jambi, dengan artian bahwa jumlah monev terhadap media penyiaran telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Pemantauan Media Online ini bekerjasama dengan Indikator indonesia. Berita Berita tersebut dikemas dalam satu buku laporan yang dicetak setiap satu minggu atau setiap harinya tergantung daripada kebutuhan.

Program/Kegiatan Pendukung dan Efektifitas Penggunaan sumber daya

Untuk mencapai target indikator Peningkatan Keterbukaan Informasi Perangkat Daerah dilaksanakan pada Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang terdiri dari 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 18,714,864,741,- dengan realisasi anggaran sebesar 18,514,351,180,- atau 98,93% disini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 200,513,561,-

2. Pencapaian Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Target yang direncanakan pada tahun 2022 untuk Nilai Indeks SPBE adalah 2,70 (Baik)

Dasar Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022 dari Kementerian PAN RB:

| Domain dan Aspek Penilaian | Bobot |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Domain 1 – Kebijakan SPBE | 13% |
| Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE | 13% |
| Domain 2 - Tata Kelola SPBE | 25% |
| Aspek 2 - Perencanaan Strategis | 10% |
| Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi | 10% |
| Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE | 5% |
| Domain 3 - Manajemen SPBE | 16,5% |
| Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE | 12% |
| Aspek 6 - Audit TIK | 4,5% |
| Domain 4 - Layanan SPBE | 45,5% |
| Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 27,5% |
| Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik | 18% |

| Predikat Indeks SPBE | | | KETERANGAN |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
| NO | NILAI INDEKS | PREDIKAT | KETERANGAN |
| 1 | 4,2 – 5,0 | Memuaskan | *) Target penilaian: Predikat Baik |
| 2 | 3,5 - < 4,2 | Sangat Baik | |
| 3 | 2,6 - < 3,5 | Baik *) | |

| | | | |
|---|-------------|--------|----------------------|
| 4 | 1,8 - < 2,6 | Cukup | (indeks minimal 2,6) |
| 5 | < 1,8 | Kurang | |

Tim Kementerian PAN RB bersama Asesor Eksternal telah melakukan verifikasi, validasi dan penilaian pelaksanaan SPBE. Sesuai dengan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Pemerintah Provinsi Jambi tercatat di angka Indeks 2,19 dengan kategori CUKUP.

Evaluasi SPBE terdiri dari 4 domain yaitu Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE. Nilai Domain Kebijakan SPBE naik karena telah disusunnya kebijakan SPBE yaitu Masterplan SPBE, Arsitektur SPBE dan Peraturan Gubernur Jambi tentang SPBE selain itu Domain Layanan SPBE juga naik dari tahun sebelumnya.

Dari evaluasi SPBE tahun 2022, dapat digambarkan bahwa Domain Manajemen SPBE yang menjadi kelemahan pada SPBE Provinsi Jambi. Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE ini terdiri dari 8 kategori dan juga termasuk Audit TIK, untuk meningkatkan manajemen SPBE ini diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh perangkat daerah. Untuk meningkatkan keberhasilan penerapan SPBE Provinsi Jambi secara keseluruhan mutlak diperlukan tanggungjawab dari lintas perangkat daerah yang saling terkait, koordinasi yang baik, sinergi, komitmen serta kesungguhan perangkat daerah.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Indikator kinerja Indeks SPBE antara lain:

- a) Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi, serta pemanfaatan informasi dan teknologi, klasifikasi informasi melalui persandian, dan pengelolaan data statistik sektoral serta terbatasnya jumlah Sumber Daya Aparatur baik secara kuantitas dan kualitas dalam pengembangan pengetahuan dibidang jaringan

internet dan intranet, programmer, database, website, serta statistik dan persandian;

- b) Belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi e-government meskipun kelembagaan sudah terbentuk, sulitnya koordinasi kelembagaan, sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian berkala.

Dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kominfo maka ditetapkan beberapa strategi sebagai upaya dari pemecahan masalah antara lain:

- a) Menugaskan SDM yang ada untuk mengikuti diklat-diklat, workshop dan sejenisnya, khususnya dalam hal komunikasi dan informasi. Selain itu dimasa yang akan datang hendaknya merekrut SDM sesuai dengan bidang keahliannya masing – masing;
 - b) Pengelolaan sistem yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh PD yaitu dengan membangun sistem informasi manajemen secara *online* dengan berkoordinasi intensif dengan PD yang bersangkutan;
 - c) Mengadakan sosialisasi yang bertujuan permohonan kerjasama dan pemberitahuan cara operasional update informasi pada web Pemerintah Provinsi Jambi;
 - d) Perlunya penguatan *data center* yang menjadi pusat data Pemerintah Provinsi Jambi dengan peran serta seluruh Perangkat Daerah dengan peran Dinas Komunikasi Informatika sebagai koordinator;
 - e) Perlunya penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet lingkup Pemerintah Provinsi Jambi pada semua Perangkat Daerah;
 - f) Peningkatan komitmen dan implementasi *e-Government* Pemerintah Provinsi Jambi;
 - g) Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman dan handal;
 - h) Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Provinsi Jambi

yang menguasai teknologi informasi secara berkala dan berkelanjutan.

Untuk Provinsi Jambi akan dilakukan penguatan pada Tim Koordinator SPBE yang terdiri dari perwakilan seluruh OPD dan dapat ditentukan tindaklanjut dari hasil evaluasi SPBE tahun 2022 serta tindaklanjut dalam penerapan SPBE tahun berikutnya. Juga kinerja Tim Asesor Internal tahun 2023 yang akan melakukan evaluasi mandiri sebelum evaluasi oleh Tim Kementerian PANRB

Program/Kegiatan Pendukung dan Efektifitas Penggunaan sumber daya

Untuk mencapai target indikator Nilai Indeks SPBE dilaksanakan pada Program pengelolaan Aplikasi Informatika yang terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 22,933,460,573,- dengan realisasi anggaran sebesar 22,195,713,300,- atau 96,78% disini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 737,747,273,- terdapatnya efisiensi anggaran tersebut dikarenakan adanya selisih pengadaan belanja modal.

Program Prioritas

Selain indikator tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi juga terdapat program prioritas Gubernur Jambi yang termasuk dalam program Dumisake yaitu Jambi cerdas dan pintar berupa pengadaan internet bagi desa-desa yang masih termasuk dalam kategori blank spot.

Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Kominfo Kabupaten Kota di Provinsi Jambi jumlah desa yang masuk dalam kategori blank spot se provinsi Jambi berjumlah 285 desa dan pada tahun 2022 Dinas Kominfo Provinsi Jambi menargetkan 121 desa yang akan diadakan akses internet, dengan rincian sebagai berikut :

| NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH KECAMATAN | JUMLAH DESA/ KELURAHAN | REALIASI 2022 |
|----|----------------------|------------------|------------------------|---------------|
| 1 | KOTA JAMBI | 0 | 0 | |
| 2 | MUARO JAMBI | 3 | 10 | 5 |
| 3 | BATANGHARI | 8 | 22 | 10 |
| 4 | TANJUNG JABUNG BARAT | 10 | 54 | 22 |
| 5 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 10 | 21 | 9 |
| 6 | SAROLANGUN | 5 | 14 | 8 |
| 7 | MERANGIN | 16 | 60 | 25 |
| 8 | BUNGO | 12 | 32 | 13 |
| 9 | TEBO | 12 | 33 | 13 |
| 10 | KERINCI | 12 | 38 | 19 |
| 11 | KOTA SUNGAI PENUH | 1 | 1 | 1 |
| | | 89 | 285 | 125 |

Dari 121 desa yang menjadi target pengadaan internet bagi desa yang masuk kategori blank spot, dapat direalisasikan sebanyak 125 desa, 4 desa tambahan dikarenakan untuk menunjang kegiatan fasilitasi geopark menjadi warisan Unesco.

Dalam pengadaan internet bagi desa yang masuk dalam kategori blank spot digunakan 3 metode atau cara agar dapat dilaksanakan dengan optimal yaitu :

- 1) Penggunaan fiber optic, ini digunakan bagi daerah/desa yang tidak terlalu jauh dari jaringan kabel fiber optic terdekat
- 2) Triangle yaitu dengan membuat tiang pemancar kecil yang berfungsi sebagai penguat sinyal yang diambil dari BTS terdekat
- 3) VSAT yaitu akses internet yang menggunakan satelit, ini digunakan apabila kondisi geografis sangat terpencil/sulit dijangkau.

Faktor Penghambat/kendala yang dihadapi :

1. Kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau sehingga menyulitkan dalam proses pemasangan peralatan
2. Keterbatasan alat sehingga jangkauan akses internet yang dapat dinikmati berkisar radius 50-100 meter

3. Ketidak tahuan masyarakat desa terkait penggunaan fasilitas internet desa

B. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi dianggarkan melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi pada tahun 2022 disesuaikan dengan Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 5 Program 12 kegiatan dan 39 Sub kegiatan dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 58.724.320.013,- dana yang terealisasi sebesar 56.660.392.686,- atau 96.49%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Provinsi Jambi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran tahun 2022

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN | APBD MURNI | SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------|
| | | | | Rp. | % |
| BELANJA LANGSUNG | | | | | |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 13.916.960.473 | 15.136.678.818 | 14.139.329.460 | 93,41 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.800.000 | 1.980.000 | 1.950.000 | 98,48 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | 2.293.301.050 | 2.988.001.050 | 2.976.995.511 | 99,63 |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 11.298.338 | 16.454.354 | 15.698.498 | 95,41 |

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | | |
| 4 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 32.592.860 | 23.078.790 | 17.763.560 | 76,97 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 14.005.000 | 8.590.000 | 5.075.000 | 59,08 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD | 6.250.000 | 12.564.000 | 11.412.000 | 90,83 |
| 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi SKPD | 161.405.000 | 232.515.443 | 144.579.200 | 62,18 |
| 8 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.302.466.547 | 9.315.486.952 | 8.795.419.145 | 94,42 |
| 9 | Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 231.360.000 | 190.874.400 | 187.669.800 | 98,32 |
| 10 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.565.000 | 5.025.000 | 2.700.000 | 53,73 |
| 11 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 38.750.000 | 155.078.800 | 105.021.661 | 67,72 |
| 12 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 85.172.834 | 113.001.852 | 109.427.050 | 96,84 |
| 13 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 30.800.000 | 34.277.000 | 20.040.000 | 58,46 |
| 14 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 23.422.250 | 38.756.050 | 37.413.655 | 96,54 |
| 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 44.912.912 | 49.366.824 | 45.881.200 | 92,94 |
| 16 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 302.514.590 | 653.834.995 | 517.597.726 | 79,16 |
| 17 | Pengadaan Mebel | 19.019.566 | 128.783.644 | 111.438.809 | 86,53 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 18 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 169.107.872 | 295.088.734 | 272.551.360 | 92,36 |
| 19 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | 222.020.720 | 332.943.330 | 261.813.435 | 78,64 |
| 20 | Pemeliharaan/rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | 162.822.153 | 476.497.600 | 446.136.000 | 93,63 |
| 21 | Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | 50.010.000 | 64.480.000 | 52.745.850 | 81,80 |
| | | | | | |
| II | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 17.354.183.184 | 18.714.864.741 | 18.514.351.180 | 98,93 |
| 22 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 374.538.700 | 394.341.700 | 376.436.408 | 95,46 |
| 23 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 6.394.911.368 | 14.525.861.361 | 14.460.345.001 | 99,55 |
| 24 | Pelayanan Informasi Publik | 340.388.720 | 340.388.580 | 318.022.543 | 93,43 |
| 25 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 1.546.293.640 | 1.896.644.350 | 1.859.804.299 | 98,06 |
| 26 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | 272.549.200 | 252.628.750 | 226.421.778 | 89,63 |
| 27 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 980.061.326 | 1.305.000.000 | 1.273.321.151 | 97,57 |
| | | | | | |
| III | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 315.062.650 | 829.496.569 | 758.562.663 | 91,45 |
| 28 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi | 122.863.350 | 320.694.417 | 297.495.247 | 92,77 |

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | data Statistik Sektoral | | | | |
| 29 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi | 96.056.000 | 181.915.825 | 156.405.367 | 85,98 |
| 30 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | 96.143.300 | 326.886.327 | 304.662.049 | 93,20 |
| | | | | | |
| IV | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 1.252.907.388 | 1.109.819.312 | 1.052.436.083 | 94,83 |
| 31 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik | 90.876.530 | 141.618.836 | 136.370.906 | 96,29 |
| 32 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | | 107.239.028 | 104.778.012 | 97,71 |
| 33 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 391.174.003 | 551.176.648 | 502.762.703 | 91,22 |
| 34 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | 309.784.800 | 308.524.462 | 99,59 |
| | | | | | |
| V | Program Pengelolaan Aplikasi Informasi | 22.917.595.990 | 22.933.460.573 | 22.195.713.300 | 96,78 |
| 35 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan, Pemerintahan Daerah Provinsi | 122.507.963 | 168.502.214 | 147.892.854 | 87,77 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | |
| 36 | Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi | 379.213.000 | 230.635.583 | 210.184.262 | 91,13 |
| 37 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik | 370.597.000 | 679.087.621 | 636.364.369 | 93,71 |
| 38 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 883.235.090 | 7.309.159.300 | 7.196.408.824 | 98,46 |
| 39 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | | 14.546.075.855 | 14.004.862.991 | 96,28 |
| | JUMLAH KESELURUHAN | 54.115.362.900 | 58.724.320.013 | 56.660.392.686 | 96,49 |

Sumber LPPK Dinas Kominfo Provinsi Jambi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 58.724.320.013 dengan realisasi sebesar Rp. 56.660.392.686 atau sebesar 96,49% dan berdasarkan data dari laporan kinerja dan LPPK bahwa capaian Kinerja sebesar 97.89% dengan demikian anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi pada tahun 2022.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi Tahun 2022. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJ Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun Anggaran tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi dianggarkan melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi pada tahun 2022 disesuaikan dengan Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 5 Program 12 kegiatan dan 39 Sub kegiatan dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 58.724.320.013,- dana yang terealisasi sebesar 56.660.392.686,- atau 96.49%

(sembilan puluh enam koma empat puluh sembilan) persen dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Jambi.

